



RENCANA KERJA TAHUNAN 2023



Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan Tarakan

KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan yaitu

“Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya”

maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menetapkan misi yaitu:

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan;
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi;
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidayaikan yang bebas dari hama dan penyakit.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Tarakan untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Balai KIPM Tarakan Tahun 2023 sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai KIPM pada tahun anggaran 2023.

Demikian RKT Balai KIPM Tarakan Tahun 2023 disusun supaya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Tarakan, 26 Januari 2023

Kepala Balai KIPM Tarakan



Umar, S.Pi.,M.Si.,M.M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Tugas dan Peran Organisasi.....	4
1.2. Tujuan	5
1.3. Sasaran.....	6
BAB II	7
RENCANA KINERJA TAHUNAN	7
2.1. Rencana Strategis.....	7
2.1.1. Visi dan Misi	7
2.1.2. Tujuan Strategis	8
2.2. Arah Kebijakan.....	8
2.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan	10
2.3.1. Sasaran Kegiatan	10
2.3.2. Indikator Kinerja Kegiatan.....	10
2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Tarakan.....	14
BAB III	17
PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara maka pembangunan BKIPM merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu BKIPM dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk Negara mitra dagang seperti: **Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada**, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) *Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*) hambatan non tarif (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangan system jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global. Dengan demikian peran BKIPM sangat strategis dalam kerangka ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Tarakan Tahun 2023 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Tarakan Tahun 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Tarakan pada Tahun 2023.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan Balai KIPM Tarakan adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Tarakan Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut RPJM Balai KIPM Tarakan tahun 2020-2024 yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian / Lembaga (RKA-KL) Balai KIPM Tarakan Tahun Anggaran 2023 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Tarakan pada tahun 2023.

BAB II

RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Oleh karena itu dalam upaya memperkuat peranan sektor kelautan dan perikanan maka Kementerian kelautan dan perikanan menetapkan visi pembangunan kelautan dan perikanan dalam “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional” serta menetapkan misi antara lain:

1. Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
3. Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global serta nasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi. Sehubungan dengan itu, selaras dengan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sesuai dengan fungsi dan peran BKIPM dalam pembangunan kelautan dan perikanan maka visi pembangunan KIPM adalah

“Hasil Perikanan yang Sehat, Bermutu, Aman dan Terpercaya”

serta menetapkan misi :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan;
2. Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi;
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidayaikan yang bebas dari hama dan penyakit.

2.1.2. Tujuan Strategis

Tujuan pembangunan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BKIPM adalah **“Meningkatnya Lalu Lintas Hasil Perikanan yang Memenuhi Sistem Jaminan Kesehatan Serta Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan”** dengan sasaran:

1. Persentase media pembawa hama dan penyakit ikan impor ekspor dan antara raya yang bebas penyakit ikan karantina dan hama penyakit ikan yang dipersyaratkan;
2. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan negara mitra;
3. Jumlah sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu sertifikat haccp di unit pengolahan ikan sebagai persyaratan ekspor.

2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang kekarantinaaan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BKIPM. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BKIPM dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2020-2024, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2020-2024 sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing dan nilai tambah produk perikanan sebagai upaya untuk pemantapan system jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan (quality and safety assurance) hasil perikanan melalui strategi:
 - a. Pengembangan sistem pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
 - Sertifikasi penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan
 - Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity pada Unit Usaha Perikanan (UUP)
 - Penerapan Instalasi Karantina Ikan yang memenuhi standar dan menerapkan biosecurity pada Unit Usaha Perikanan (UUP)
 - Penerapan sistem traceability rantai pasok bahan baku pada Unit Pengolahan Ikan (UPI)
 - Konsistensi penerapan sistem manajemen mutu yang berstandar internasional (ISO)
 - b. Harmonisasi sistem penjaminan mutu yang implementatif
 - Penyelesaian penanganan kasus ekspor hasil perikanan
2. Pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Pengelolaan sumberdaya harus dilakukan dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina serta jenis agen hayati yang dilindungi, dilarang, dan dibatasi yang dapat menggagalkan produksi perikanan dan memusnahkan keanekaragaman sumberdaya hayati perikanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya melalui strategi:

 - Pengawasan dan pencegahan jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi di exit /entry point impor, ekspor maupun antar area
3. Pelaksanaan tata kelola yang baik, akan dilaksanakan melalui strategi :
 - Pengelolaan sumber daya manusia yang professional
 - Penerapan inovasi pelayanan public
 - Penerapan manajemen berbasis kinerja dan efektivitas pengelolaan

2.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

2.3.1. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tarakan seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BKIPM tersebut dibagi dalam 4 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Karantina Ikan

SK1.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

2. Kegiatan Pengendalian Mutu

SK2.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

SK3.1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

SK3.1 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM

2.3.2. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2023. Indikator kinerja kegiatan Balai KIPM Tarakan seiring dengan implementasi kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Indikator kinerja Program Balai KIPM Tarakan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif	1	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina (%)	98
		2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup Balai KIPM Tarakan (%)	100
		3	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)	4
		4	Dokumen mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/ HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa (Dokumen)	1
		5	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Balai KIPM Tarakan (%)	90
		6	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (lokasi)	2
		7	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	92
		8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Unit)	9
Kegiatan 2. Pengendalian Mutu				
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (sertifikat)	10
		10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Lokasi)	4
		11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	5
		12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Produk)	28

		13	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (UPI)	18
Kegiatan 3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	14	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Tarakan (nilai)	84
		15	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	78
		16	Lokasi Usaha Perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Lokasi)	3
KEGIATAN 4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	17	Unit berpredikat Menuju WBK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Unit)	1
		18	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Indeks)	84
		19	Nilai Rekonsiliasi kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan	85
		20	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	≤ 0,5
		21	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	75
		22	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	89
		23	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (Nilai)	86
		24	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/ Jasa BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	77,5
		25	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup UPT Balai KIPM Tarakan (%)	77,5

Dalam mewujudkan target indikator kinerja kegiatan tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut:

1. Pengendalian Mutu;
2. Karantina Ikan;
3. Satisfikasi sistem dan kepatuhan;
4. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM

Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleh meningkatnya lalu lintas hasil perikanan baik ekspor maupun domestik. Jaminan kesehatan ikan diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil. Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya

merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

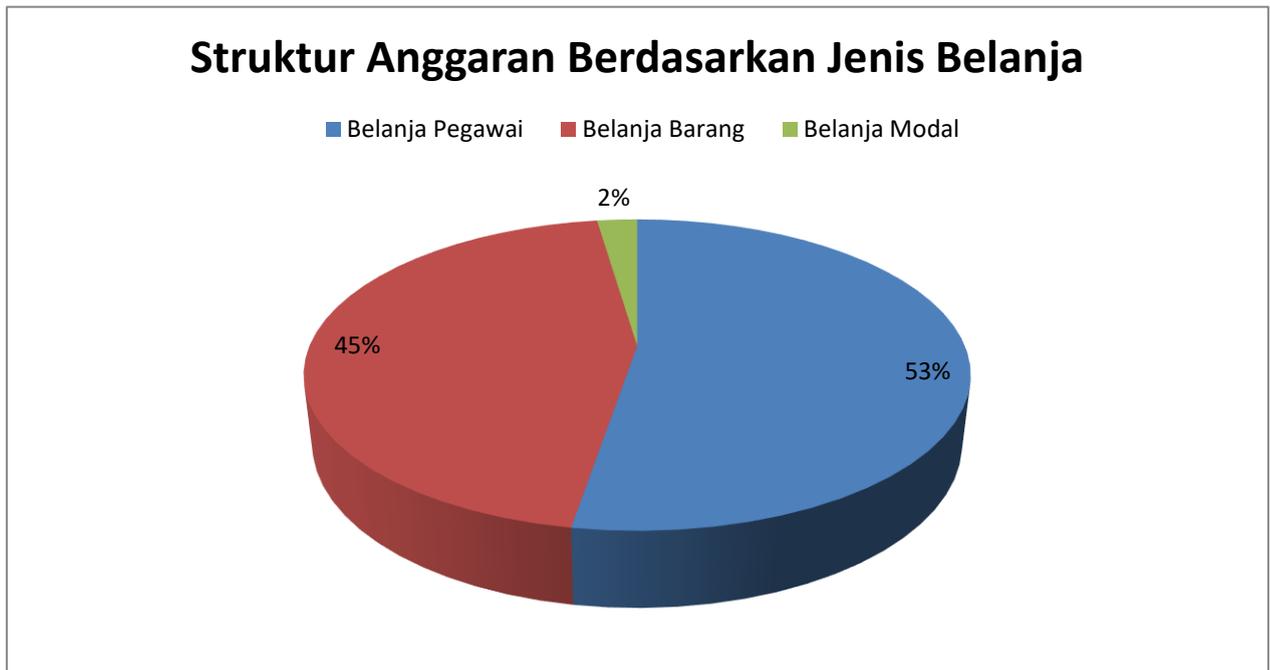
Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Korea, China dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Tarakan

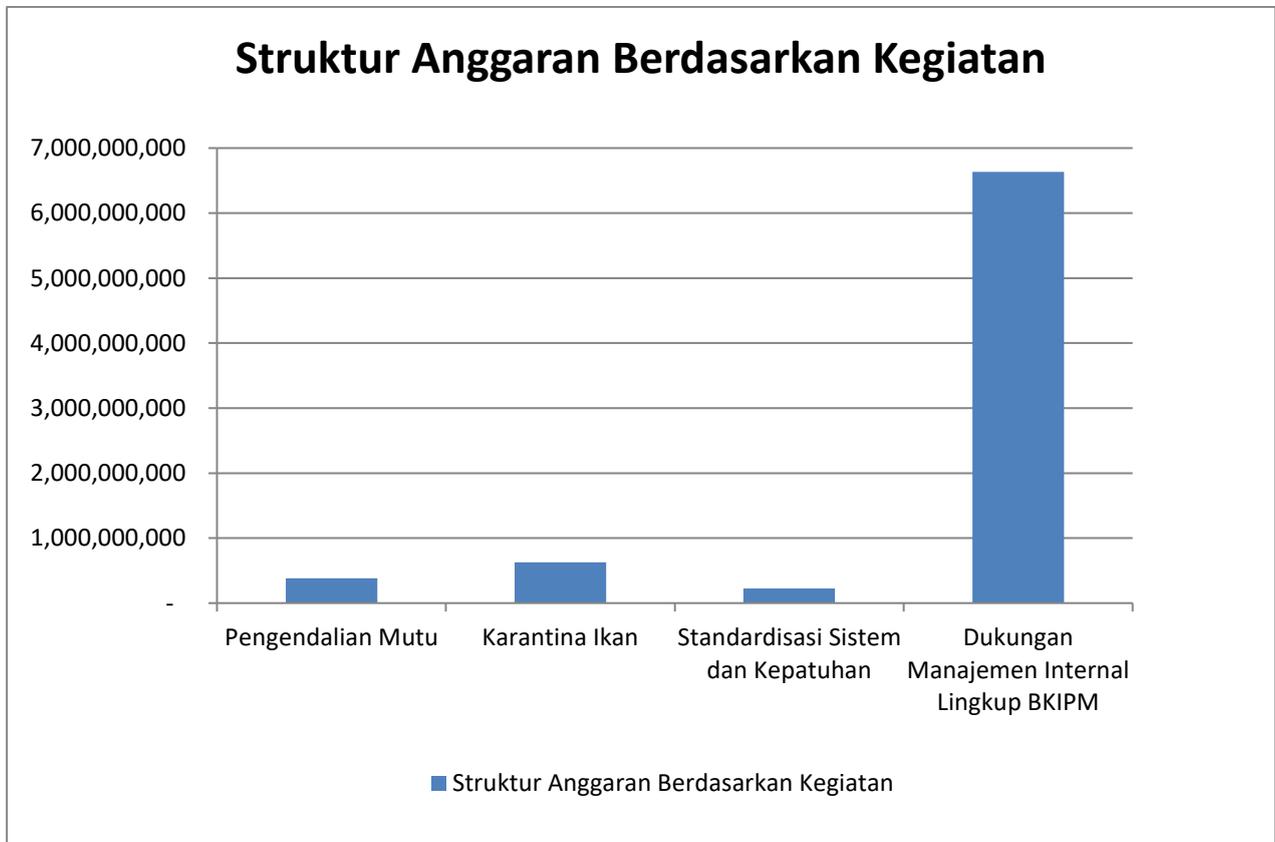
Rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Tarakan Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai target-target kinerja karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana kerja Balai KIPM Tarakan dalam mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Tarakan untuk mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereview dan refocusing kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut.

➤ Grafik Struktur Anggaran berdasarkan jenis belanja



➤ Grafik Struktur Anggaran berdasarkan kegiatan



Program : Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

Jumlah Anggaran Tahun 2023 : Rp. 7.875.414.000,-

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
	Pengendalian Mutu	384.000.000
2	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	
	Karantina Ikan	628.275.000
	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	227.000.000
3	Program Dukungan Manajemen	
	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	6.636.139.000
Total Anggaran Balai KIPM Tarakan Tahun 2023		7.875.414.000

BAB III

PENUTUP

Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada TA 2023 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan perikanan. Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain:

1. Industrialisasi KP berdaya saing
2. Sumberdaya Kelautan yang Berkelanjutan
3. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BKIPM

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan memerlukan adanya dukungan unit kerja terkait dan masyarakat luas. Komitmen dan kerja keras dari pimpinan dan seluruh pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Balai KIPM Tarakan, serta sinergitas dengan semua pihak terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan harapan untuk menjadikan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan TA 2023.

Lampiran
RKAKL TA. 202

